

PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR

Ferdinandus Ngau Lobo¹, Emilianus Harun Liwun², Gabriel Amsikan³
ferdinandlobo@unwira.ac.id¹, emilianusliwun@gmail.com², gabriel2002amsikan@gmail.com³
Universitas Katolik Widya Mandira

ABSTRAK

Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Flores Timur memiliki kontribusi besar dalam sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, potensi besar ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai, kurangnya konservasi lingkungan, dan partisipasi masyarakat yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Flores Timur dan untuk mengetahui faktor penyebab pembangunan pariwisata tidak berjalan dengan baik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan sumber relevan lainnya. Analisis menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tantangan yang memerlukan solusi strategis, namun pemerintah berupaya untuk melakukan pelestarian dan pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kesimpulannya, pembangunan pariwisata berkelanjutan di Flores Timur harus didukung oleh berbagai pihak melalui peningkatan infrastruktur, konservasi lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, potensi besar pariwisata dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Pariwisata Berkelanjutan, Flores Timur, Konservasi Lingkungan.

ABSTRACT

Sustainable tourism development in East Flores Regency has great contribution in economic, social, and environmental sectors. However, this great potential is faced with various challenges such as inadequate infrastructure, lack of environmental conservation, and limited community participation. This research aims to examine sustainable tourism development in East Flores and to find out the factors that cause tourism development to not run well. The method used is normative juridical, with a literature study approach to analyze secondary data from legislation, research results, and other relevant sources. The analysis shows that there are still many challenges that require strategic solutions, but the government is trying to preserve and develop sustainable tourism to improve the welfare of local communities. In conclusion, sustainable tourism development in East Flores must be supported by various parties through infrastructure improvement, environmental conservation, and active community participation. Thus, the great potential of tourism can be optimally utilized for the welfare of local communities.

Keywords: Sustainable Tourism, East Flores, Environmental Conservation

PENDAHULUAN

Banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial politik, budaya, regional, dan lingkungan, yang secara signifikan dipengaruhi oleh pariwisata. Dengan garis pantai dan sumber daya lautnya yang luas, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. 5,8 juta km² merupakan perairan Indonesia, dimana 3,1 juta km² berada di laut teritorial Indonesia dan 2,7 juta km² merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang secara keseluruhan mencakup sekitar 70% dari total luas wilayah Indonesia. Dengan ribuan pulau dan lautan luas di sekelilingnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menawarkan berbagai pengalaman wisata alam. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1 Angka 4, menyatakan bahwa pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan masyarakat dan negara

serta melibatkan berbagai macam kegiatan yang terkait. Tergantung pada kebutuhan masing-masing negara, hal ini melibatkan pertukaran antara pengunjung dan masyarakat setempat, pemerintah, serta sektor korporat. Pemerintah mendorong pertumbuhan pariwisata karena memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia, terutama sebagai sumber devisa negara. Sebagian besar ekonomi Indonesia bergantung pada pariwisata. Selain menggerakkan ekonomi, pariwisata juga membantu mengurangi pengangguran. Diharapkan bahwa pengembangan pariwisata yang menyeluruh akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan di daerah-daerah tujuan wisata.

Sektor pariwisata memiliki banyak manfaat dan kontribusi, termasuk ekonomi, sosial, politik, budaya, kewilayahan, dan lingkungan. Dengan pertumbuhan bisnis pariwisata, pariwisata berkontribusi pada pendapatan negara, pendapatan asli daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Industri ini memiliki potensi untuk memperluas kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, dan meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Seiring dengan pertumbuhan pariwisata, kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga meningkat, yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Berpergian ke luar negeri dapat meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme seseorang. Pengakuan atas kekayaan budaya dan alam Indonesia oleh masyarakat dunia telah meningkatkan kebanggaan nasional dan mendukung upaya diplomasi budaya untuk meningkatkan posisi Indonesia di luar negeri.

Banyak negara yang ekonominya tumbuh sebagian besar karena pariwisata, terutama negara-negara yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang luar biasa. Pariwisata diprediksi akan menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk lokal dengan menarik pengunjung dari dalam dan luar negeri. Meskipun demikian, ada keuntungan dan kerugian dalam pariwisata. Meskipun undang-undang dan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mencegah pengunjung merusak lingkungan bermanfaat bagi ekosistem, namun hal ini juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu membuat masyarakat umum dan industri pariwisata kurang sadar akan perlunya melestarikan lingkungan. Wisatawan juga dapat mengganggu lalu lintas di sekitar tempat wisata. Polusi udara dan air, sampah yang menurunkan kualitas lingkungan, dan kemacetan lalu lintas adalah beberapa aspek lingkungan yang dikaji. Meskipun terdapat banyak pengaruh buruk dari adanya pariwisata terhadap lingkungan, namun tetap saja pariwisata merupakan salah satu dari sekian banyak faktor dalam memajukan kehidupan ekonomi suatu wilayah. Seluruh wilayah di Indonesia mempunyai sistem kepariwisataan, tak terkecuali pada Kabupaten Flores Timur yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan potensinya yang luar biasa, pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling cepat berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang luar biasa, budaya yang beragam, dan warisan sejarah yang tak ternilai harganya. Kabupaten Flores Timur adalah salah satu wilayah Indonesia dengan prospek pariwisata yang menjanjikan.

Kabupaten Flores Timur terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur di pesisir timur Pulau Flores. Daerah ini memiliki pantai-pantai yang indah, beragam budaya, dan pesona alam yang menakjubkan. Kabupaten Larantuka merupakan tujuan wisata yang populer bagi wisatawan domestik maupun mancanegara karena kekayaan alam dan budayanya. Selain itu, Larantuka juga memiliki nilai sejarah yang tinggi, terutama terkait dengan penyebaran agama Katolik di wilayah tersebut. Gereja-gereja tua yang masih lestari hingga kini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah agama Katolik di Indonesia, yang menarik minat wisatawan religi dari berbagai negara yakni prosesi Semana Santa di Larantuka.

Wisata religius adalah fenomena yang telah ada sejak lama, di mana agama menjadi alasan utama untuk perjalanan non-ekonomi. Namun, fenomena ini sudah ada sejak lama, dan perjalanan agama atau spiritual terus berkembang dan menjadi bagian penting dari pariwisata global, yang harus dipertahankan untuk masa depan. UNWTO memperkirakan bahwa seperempat dari jumlah wisatawan internasional mengunjungi situs religius utama di seluruh dunia setiap tahun, berkisar antara 300 dan 330 juta orang. UNWTO juga menyatakan bahwa liburan membantu meremajakan fisik, mental, dan spiritual, bukan hanya rekreasi. Hal ini didukung oleh peningkatan wisata religi di atas rata-rata, terutama di Asia, di mana jumlah peziarah dan wisatawan meningkat. Katolik adalah salah satu agama yang paling sering mengadakan pertemuan skala besar, terutama pada hari raya agama. Semana Santa, yang juga dikenal sebagai Pekan Suci, adalah salah satu perayaan Paskah yang paling terkenal. Perayaan ini, yang sangat khas di beberapa daerah-khususnya Spanyol-telah menjadi ziarah lokal yang menguntungkan. Awal mula sejarah ritual ini terjadi di Andalusia, Spanyol, setelah pengusiran bangsa Moor dan penaklukan kembali. Upacara ini diselenggarakan oleh Gereja Katolik Spanyol untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan adat istiadat Kristen setelah berabad-abad pengaruh Arab dan Muslim. Gambar-gambar yang menggambarkan penderitaan Kristus digunakan dalam prosedur ini (Los Pasos). Kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari para misionaris Portugis ini juga dilakukan di Larantuka. Mulyati (2019) menyatakan bahwa prosesi Semana Santa di Larantuka mengalami inkulturasi yang memadukan adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang dibawa oleh Portugis. Meskipun beberapa adat istiadat telah berubah, sebagian besar masih diikuti. Banyak perayaan Thanksgiving yang berbeda adalah hasil dari proses inkulturasi ini. Adat istiadat lokal yang kuat melingkupi perayaan-perayaan seperti Tikam Turo dan Rabu Trewa. Menurut Mulyati (2019), masyarakat menghormati leluhur mereka yang berada di korke (rumah ibadah) selama pawai Semana Santa. Korke-korke ini akhirnya menjadi gereja-gereja kecil dengan salib di dalamnya, dan sumbangan raja ditukar dengan pungutan. Pemerintah daerah kemudian menetapkan Semana Santa sebagai destinasi unggulan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2013. Hal ini karena daya tariknya yang telah dilindungi oleh penduduk setempat selama bertahun-tahun dan diperkuat dengan meningkatnya jumlah peziarah yang datang ke sini setiap tahun. Hal ini kemudian berkembang menjadi penawaran utama dari industri wisata ziarah yang sedang berkembang di Larantuka. Di beberapa bagian tertentu di Flores Timur, pemerintah menetapkan lokasi pengembangan berdasarkan lokasi situs religius dalam upaya untuk meningkatkan pariwisata ziarah yang terkait dengan ritual Semana Santa. Di antara tempat-tempat tersebut adalah Katedral Reinha Rosari, Kapela Tuan Ma, Kapela Tuan Ana, Kapela Tuan Meninu dan Prosesi Laut, Situs Desa Wureh, Armida-Armida, Benteng Port Henriques, dan Situs Desa Konga. Delapan lokasi tersebut termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Larantuka, KSP Sagu, dan KSP Ritaebang. KSP Larantuka merupakan pusat wisata ziarah utama karena memiliki konsentrasi terbesar dari situs-situs ritual Semana Santa. KSP Ritaebang berperan sebagai pendukung, dan KSP Sagu berperan sebagai penyangga. Hasil utama dari KSP Larantuka adalah untuk memberikan prioritas utama pada pengembangan kawasan yang terhubung dengan situs-situs religius yang berbeda, termasuk Gereja Katedral, Kapela Tuan Ma, Kapela Tuan Ana, dan Kapela Tuan Meninu; selain itu, Istana Raja Larantuka, Istana Keuskupan Larantuka, dan jalur prosesi Jumat Agung (armida-armida). Kawasan ini sebagian besar terletak di Kecamatan Larantuka.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, pembangunan pariwisata di Kabupaten Flores Timur masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi

infrastruktur yang belum memadai, kurangnya konservasi lingkungan, partisipasi masyarakat yang terbatas, dan masih banyak lagi. Sehingga, untuk memastikan bahwa pariwisata di Kabupaten Flores Timur berkembang secara berkelanjutan dan menguntungkan masyarakat setempat, diperlukan perhatian dan upaya nyata dari berbagai pihak..

METODE PENELITIAN

Dalam rangka penyusunan Naskah Akademik, metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Sebagai suatu metode penelitian hukum yang digunakan di perpustakaan, pendekatan yuridis normatif mengkaji teori-teori, asas-asas, norma-norma, dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari metodologi ini adalah untuk mengumpulkan beragam karya literatur yang memiliki relevansi dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini menganalisis data sekunder dari undang-undang, hasil penelitian, atau penelitian lain dengan menggunakan tinjauan pustaka. Data primer dan sekunder dari penelitian lapangan dan tinjauan literatur membentuk data yang digunakan. Buku-buku dan tinjauan pustaka merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam studi kepustakaan, bersama dengan sumber-sumber terkait lainnya termasuk hasil penelitian, peraturan, dokumen resmi, makalah seminar, artikel berita dari media, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Kebijakan internasional, nasional, regional, dan lokal memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan sistem pariwisata di Kabupaten Flores Timur. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang efektif, berkelanjutan, dan menguntungkan, yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk merancang rencana pembangunan yang efektif, penting untuk memiliki undang-undang yang jelas dan ditetapkan. Oleh karena itu, tinjauan kebijakan pembangunan menjadi sangat penting dan harus memberikan panduan untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Evaluasi kebijakan sistem pariwisata ini berpengaruh pada perkembangan pariwisata di Kabupaten Flores Timur, dengan fokus pada:

Kebijakan Pariwisata Internasional

Di Rio de Janeiro, Brasil, pada tanggal 3-14 Juni 1992, 179 negara, termasuk Indonesia, secara resmi mengadopsi Agenda 21 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi. Agenda 21 adalah seperangkat kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah abad ke-21 dengan mengadvokasi pembangunan berkelanjutan dan mengarahkan kembali pembangunan ke arah komponen-komponen ekonominya. Diharapkan bahwa masyarakat, bisnis, dan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan sehari-hari mereka dengan menyeimbangkan kemajuan sosial, politik, dan ekonomi. Mengikuti Agenda 21 Nasional, Agenda 21 Sektorial menawarkan kerangka kerja dan arahan untuk pembangunan di area dan industri tertentu. Lima sektor pembangunan utama yang tercakup dalam Agenda 21 Sektorial adalah pertambangan, kehutanan, pariwisata, perumahan, dan industri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi lembaga-lembaga tersebut dalam menjamin pembangunan berkelanjutan pada skala nasional dan regional.

Kebijakan Pariwisata Nasional Landasan intelektual (prinsip-prinsip agama dan Pancasila) dan konstitusional (Undang-Undang Dasar 1945) yang diterapkan oleh para pelaku utama adalah apa yang mendorong pertumbuhan pariwisata nasional. Pilar-pilar ini kemudian diatur oleh undang-undang, perintah eksekutif, arahan menteri, perintah presiden, dan peraturan daerah, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk pengembangan industri pariwisata negara.

UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Menurut UU No. 10 Tahun 2009, tujuan pembangunan pariwisata adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan,

mengurangi pengangguran, melindungi lingkungan hidup, melindungi alam, dan melestarikan sumber daya. Hal ini juga bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang datang dengan perubahan dalam kehidupan lokal, nasional, dan internasional.

Di sisi lain, berikut ini adalah prinsip-prinsip panduan pengelolaan pariwisata:

- a. Menghormati adat istiadat agama dan nilai-nilai budaya sebagai representasi dari gagasan kehidupan dalam keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan lingkungan;
- b. Melestarikan hak asasi manusia, keanekaragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Menjamin kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan, dan kesempatan yang adil bagi semua;.

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam upaya untuk mengoptimalkan penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya dan aset daerah, penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah adalah langkah strategis. Ini akan memungkinkan sumber daya tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Akibatnya, lokasi-lokasi utama dan daerah-daerah yang berorientasi pada pertumbuhan harus diperhitungkan oleh setiap daerah. Sektor-sektor ini harus produktif dan dapat mendukung pembangunan wilayah, memberikan manfaat yang signifikan, dan menghasilkan produktivitas tinggi yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan wilayah tersebut. Untuk mendukung upaya pemerintah pusat untuk menjadikan beberapa daerah di seluruh Nusantara sebagai unggulan dalam hal daya tarik pariwisata, setiap daerah diminta untuk mengembangkan sektor pariwisata unggulannya sendiri. Tidak dapat disangkal bahwa pariwisata adalah salah satu sumber devisa utama negara. mengembangkan area atau tempat wisata secara terpadu, terencana, dan melalui program. Tujuannya adalah untuk memenuhi tujuan pembangunan dengan cepat dan terjangkau.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur tata cara pembangunan destinasi pariwisata dan perwilayahan, pembangunan pariwisata harus mempertimbangkan tata ruang di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa kawasan pariwisata merupakan bagian dari kawasan budidaya dan bahwa kawasan budidaya tersebut memiliki nilai strategis. Undang-undang mengamankan agar pariwisata dikendalikan dalam perencanaan tata ruang, bahkan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Akibatnya, strategi perencanaan tata ruang provinsi harus diikuti seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata. Sebagai contoh, ketika Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Larantuka dibuat, hal itu harus mempertimbangkan pedoman penataan ruang yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.

Segala sesuatu yang terkait dengannya termasuk dalam pariwisata, seperti permintaan yang beragam dari setiap bangsa dan orang serta interaksi antara pengunjung dan masyarakat lokal, bisnis, dan pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 50/2011, Pasal 2, menyatakan bahwa faktor-faktor berikut ini berkontribusi pada pertumbuhan bisnis pariwisata nasional:

- a. Lokasi wisata;
- b. Pemasaran pariwisata;
- c. Industri pariwisata; dan
- d. Kelembagaan pariwisata.

Pengembangan pariwisata di desa dan daerah harus mengikuti rencana induk pariwisata nasional. Tujuan pembangunan pariwisata nasional adalah untuk memposisikan Indonesia sebagai tujuan wisata kelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Empat misi utama telah ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut:

- a. Destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan, aman, nyaman, menarik, mudah diakses, dan meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat;

- b. Pemasaran pariwisata yang unggul, tersinkronisasi, dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara;
- c. Industri pariwisata yang berdaya saing, bereputasi baik, menumbuhkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Organisasi pemerintah dan pemerintah daerah.
- e. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tujuan dari Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah untuk memberikan arahan dalam menentukan langkah-langkah dan proses yang perlu diikuti selama proses penyusunan Rencana Induk secara tertib dan metodis. Dokumen ini membahas topik-topik sebagai berikut: (1) Isi Materi; (2) Landasan Pengembangan Pariwisata Indonesia; dan (3) Proses Penyusunan. UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata mengatur prinsip-prinsip pembangunan sektor pariwisata serta prinsip-prinsip pelaksanaan dan ruang lingkup pembangunan. Lebih jauh lagi, dalam panduan ini dibahas proses penyusunan Rencana Induk, termasuk bagaimana metodologi penyusunan dokumen, alur penyusunan, keterlibatan para ahli, jadwal pelaksanaan, dan sistem pelaporan.

PRAKTEK EMPIRIS PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR

UPAYA

Tujuan pembangunan pariwisata provinsi NTT adalah untuk meningkatkan status NTT sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antara tujuan dari misi ini adalah:

- a. Menciptakan tempat wisata yang menarik, aman, nyaman, mudah diakses, dan berwawasan lingkungan yang dapat meningkatkan pendapatan lokal dan lokal.
- b. Membangun strategi pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, efisien, dan efektif adalah kunci untuk meningkatkan jumlah pengunjung domestik dan asing ke suatu destinasi.
- c. Menciptakan industri pariwisata yang kompetitif, dapat diandalkan, mendorong kolaborasi bisnis, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial budaya.
- d. Mengembangkan sistem kepariwisataan yang transparan, berakuntabilitas tinggi, efisien, dan efektif, serta sumber daya manusia, regulasi, dan tata kelola.

KENYATAAN DALAM MASYARAKAT

Banyak destinasi pariwisata di Kabupaten Larantuka yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk memenuhi standar kenyamanan dan keamanan yang diharapkan wisatawan. Infrastruktur penunjang seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum masih perlu ditingkatkan.

Industri pariwisata di Kabupaten Larantuka masih dalam tahap pengembangan dan menghadapi persaingan dengan destinasi wisata lainnya di NTT dan Indonesia. Beberapa usaha pariwisata telah menunjukkan kredibilitas dan keberhasilan, namun masih ada tantangan dalam membangun kemitraan yang kuat antara usaha kecil dan menengah serta pelaku industri pariwisata lainnya.

Kelembagaan pemerintahan dan swasta di Kabupaten Larantuka terus berusaha meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola kepariwisataan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program pariwisata.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK

1. Infrastruktur dan Prasarana

Kabupaten Flores Timur memiliki beberapa objek wisata yang menarik, seperti Pantai Asam Satu dan Pantai Ina Burak. Namun, infrastruktur dan prasarana yang kurang memadai menjadi hambatan dalam pengembangan pariwisata. Asam Satu Beach, misalnya, memiliki akses yang strategis tetapi masih terbatas oleh infrastruktur yang tidak memadai. Hambatan terbesar dari potensi wisata pantai ini adalah kondisi jalan yang buruk dan tidak adanya fasilitas pendukung seperti tempat parkir, toilet umum, dan tempat istirahat. Hal ini tidak hanya mengurangi kenyamanan wisatawan

tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal yang seharusnya dapat dihasilkan dari pariwisata. Selain itu, kurangnya fasilitas akomodasi yang memadai, seperti hotel dan restoran, membuat wisatawan cenderung memilih destinasi lain yang menawarkan kenyamanan lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dan pihak terkait harus memberi perhatian serius pada peningkatan infrastruktur dan prasarana di sekitar objek wisata. Selain itu, perlu dilakukan promosi yang lebih baik untuk menarik lebih banyak wisatawan.

2. Kekurangan Sarana dan Prasarana

Infrastruktur dan fasilitas memberikan hambatan serius bagi pertumbuhan industri pariwisata. Infrastruktur dan fasilitas yang kurang berkembang, termasuk penginapan, transportasi, dan layanan tambahan, dapat menghambat pertumbuhan industri pariwisata. Misalnya, kekurangan hotel, restoran, dan fasilitas rekreasi membuat wisatawan kesulitan menemukan tempat yang nyaman untuk menginap dan menikmati liburan mereka. Selain itu, kondisi jalan yang buruk dan minimnya transportasi umum yang efisien membuat akses ke objek wisata menjadi sulit dan mempengaruhi pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Kurangnya fasilitas dasar seperti toilet umum, area parkir yang memadai, dan pusat informasi wisata juga dapat mengurangi daya tarik suatu destinasi wisata. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah daerah, komunitas bisnis, dan masyarakat setempat harus bekerja sama untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang sudah ada. Peningkatan kualitas infrastruktur akan membantu menarik lebih banyak wisatawan, meningkatkan pengalaman mereka, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata.

3. Kurangnya Komunitas dan SDM

Beberapa desa wisata di Flores Timur, seperti Desa Golo Lewe dan Desa Runggu, menghadapi tantangan signifikan dalam pengembangan pariwisata. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya komunitas yang representatif untuk mengelola dan mempromosikan desa wisata ini. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) lokal yang kompeten juga menjadi kendala besar. Desa-desa ini belum memiliki struktur organisasi yang kuat dan representatif yang mampu mengelola potensi wisata secara profesional dan berkelanjutan. Tanpa adanya komunitas atau kelompok kerja yang solid, upaya untuk meningkatkan daya tarik wisata desa ini menjadi kurang terkoordinasi dan tidak maksimal. Selain itu, keterbatasan dalam hal tenaga kerja yang terampil dan terlatih di sektor pariwisata memperparah situasi. Banyak penduduk lokal yang belum mendapatkan pelatihan atau pendidikan yang memadai dalam bidang pariwisata, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi standar layanan yang diharapkan oleh wisatawan. Hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap kualitas pengalaman wisatawan dan pada gilirannya menurunkan reputasi desa wisata tersebut.

4. Kurangnya Promosi dan Pemasaran

Kurangnya promosi dan pemasaran yang efektif dapat menghambat pengembangan pariwisata. Tanpa strategi promosi yang baik, potensi wisata di suatu daerah sering kali tidak dikenal luas, mengakibatkan rendahnya jumlah kunjungan wisatawan. Promosi yang efektif sangat penting untuk menarik perhatian wisatawan domestik dan internasional. Ini mencakup penggunaan media sosial, website resmi, brosur, video promosi, dan kerja sama dengan agen perjalanan serta influencer pariwisata. Kampanye yang tepat dapat menyoroti keunikan dan keindahan destinasi wisata, serta fasilitas yang tersedia, sehingga wisatawan tertarik untuk berkunjung. Pemasaran yang baik juga harus melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah. Mereka perlu bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan strategi promosi yang menyeluruh dan terkoordinasi. Dengan demikian, informasi tentang potensi wisata dapat tersebar luas dan menarik minat wisatawan.

STRATEGI YANG TEPAT UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN

1. Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana

Pemerintah Kabupaten Flores Timur sedang berusaha meningkatkan infrastruktur di setiap desa wisata, termasuk memperbaiki transportasi, penginapan, restoran, dan fasilitas lainnya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Upaya ini meliputi perbaikan jalan dan aksesibilitas ke objek wisata, renovasi penginapan seperti hotel dan homestay, pengembangan restoran dengan menu lokal dan internasional, serta penyediaan fasilitas umum seperti toilet, area parkir, dan pusat informasi wisata. Selain itu, pelatihan untuk masyarakat lokal dalam manajemen pariwisata juga dilakukan

untuk meningkatkan pelayanan dan pengalaman wisatawan, sementara promosi intensif dilakukan untuk meningkatkan visibilitas destinasi wisata Flores Timur.

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pemerintah desa menggunakan dana desa untuk memperbaiki fasilitas yang masih kurang, termasuk transportasi, guna mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan akses ke objek wisata dan meningkatkan pendapatan wisatawan, langkah ini mencakup perbaikan jalan dan sarana transportasi lainnya.

3. Pengembangan Komunitas dan SDM

Diperlukan program pelatihan dan pendidikan pariwisata bagi penduduk lokal. Pemerintah daerah dan pihak terkait juga perlu mendorong pembentukan komunitas atau kelompok kerja desa wisata yang representatif dan mampu mengelola potensi wisata dengan baik. Dengan komunitas yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten, desa wisata seperti Golo Lewu dan Runggu dapat berkembang menjadi tujuan wisata yang menarik dan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat lokal secara ekonomi dan sosial.

4. Pengembangan Promosi dan Pemasaran

Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melakukan promosi yang lebih baik untuk menarik wisatawan. Hal ini termasuk mengembangkan daya tarik wisata yang ada dan meningkatkan kualitas fasilitas wisata.

KESIMPULAN

Pengembangan sistem kepariwisataan di Kabupaten Flores Timur didasarkan pada sejumlah kebijakan internasional, nasional, dan lokal yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Agenda 21 Global menjadi landasan utama, mendorong keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang berskala nasional, adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melindungi lingkungan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, undang-undang seperti UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Kepariwisata membantu perluasan pariwisata dengan mengatur pengelolaan sumber daya dan rencana induk. Pendekatan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memungkinkan daerah untuk memanfaatkan potensi mereka sendiri, terutama dalam industri pariwisata. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016, Kabupaten Flores Timur diharapkan dapat membuat rencana pembangunan pariwisata yang terstruktur dan berkelanjutan yang akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Flores Timur menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi praktik empirisnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan beberapa tantangan utama, meskipun visi pengembangan pariwisata Provinsi NTT menetapkan tujuan untuk menjadi tujuan wisata utama di Indonesia yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, infrastruktur pariwisata seperti jalan dan fasilitas umum di destinasi populer seperti Pantai Asam Satu masih terbatas dan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Kedua, industri pariwisata masih dalam tahap pengembangan dengan tantangan dalam membangun kemitraan yang kuat antara pelaku industri dan usaha kecil-menengah. Ketiga, kelembagaan pemerintahan dan swasta di Kabupaten Larantuka berupaya meningkatkan kapasitas tata kelola pariwisata, tetapi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan program-program pariwisata masih menjadi tantangan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana, membangun komunitas yang kuat, meningkatkan sumber daya manusia lokal, serta melakukan pemasaran dan promosi yang lebih efisien.

untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Flores Timur, langkah-langkah strategis perlu diambil. Pemerintah kabupaten harus fokus pada peningkatan infrastruktur termasuk jalan dan aksesibilitas ke objek wisata, renovasi penginapan, dan pengembangan restoran dengan menu lokal dan internasional. Penting juga untuk meningkatkan fasilitas umum seperti toilet, area parkir, dan pusat informasi wisata serta memberikan pelatihan manajemen pariwisata bagi masyarakat lokal. Dana desa harus dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana transportasi dan prasarana lainnya guna meningkatkan aksesibilitas ke objek wisata. Pembentukan komunitas atau kelompok kerja desa wisata yang representatif harus didorong, sambil meningkatkan SDM lokal melalui program pelatihan pariwisata. Selain itu, promosi intensif melalui media sosial, website, brosur, dan kolaborasi dengan agen perjalanan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan visibilitas destinasi wisata Flores Timur secara global dan menarik lebih banyak wisatawan

DAFTAR PUSTAKA

- Bella, Karina Okta. "Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2016): 133–158.
- Lintong, Oktavianus, and A Haris Kai. *Ripparkab Minahasa Utara 2021-2025*. Vol. 1, 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7769334>.
- Payong, Fransiskus Laga, and Nila Restu Wardani. "Analisis Pengembangan Objek Wisata Asam Satu Beach Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur." *JPIG (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi)* 3, no. 2 (2019): 293–298.
- Pratiwi, YD. "Pengembangan Aktifitas Wisata Bahari Di Pantai Labuhan Jukung Lampung." *Pengembangan Aktifitas Wisata Bahari di Pantai Labuhan Jukung Lampung* (2018): 1–8.
- Rahman, Yudha, and Mohammad Mukhtalie. "Pengaruh Aktivitas Pariwisata Pantai Taplau Kota Padang Terhadap Ekonomi, Sosial Masyarakat, Dan Lingkungan." *Jurnal Teknik PWK* 3, no. 4 (2014): 553–563.
- Soares, Yuliana O, Ronald P C Fanggidae, Juita L D Bessie, Maria G Pat Sabon, Rolland E Fanggidae, Herdinds A P Ora Pau, Rada Nabila Suharto, et al. *Analisis Potensi Wisata Di Nusa Tenggara Timur*, 2021.
- TVERSK, DANIEL KAHNEMAN AND AMOS. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN." *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN* 47, no. 57 (2009): 3.
- Universitas Billfath. "Naskah Akademikrancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongantentang Desa Wisata" (2022): 1–41.
- Wea, Novita Restiati Ina, Heddy Shri Ahimsa-Putra, and Dyah Widiyastuti. "Respon Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Ziarah Ritual Semana Santa Oleh Pemerintah Di Larantuka." *Jurnal Multidisiplin West Science* 2, no. 04 (2023): 247–269.

SUMBER LAINNYA :

- <https://news.detik.com/kolom/d-7040305/mengkaji-ulang-pengembangan-desa-wisata-di-flores> diakses pada tanggal 11 juli 2024 pukul 16.35
- <https://news.republika.co.id/berita/qynjgn330/pemkab-flores-timur-dorong-pengembangan-desa-wisata> Diakses pada 12 juli 2014 pukul 20.17.